

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai suatu pedoman dasar dalam melaksanakan mekanisme akuntansi pemerintah.

Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association* (1966) seperti yang dikutip Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014), akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Abdul Halim juga mengutip pengertian akuntansi menurut *Accounting Principles Board* (1970), akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Laporan tersebut harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Menurut Sinaga (2005), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang berpedoman pada SAP diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholder* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

2.1.2. Akuntansi Berbasis Akrual

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Fokus sistem akuntansi ini ada pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan daya pada suatu entitas.

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013), sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling *modest*. Keberhasilan Selandia Baru menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban. Pada dasarnya, akuntansi berbasis akrual mengharuskan pencatatan dilakukan pada saat

terjadinya suatu peristiwa akuntansi, transaksi ekonomi atau sebutan lainnya dari peristiwa akuntansi ketika diduga telah ada implikasi yang dapat mempengaruhi kas pada saat ada penambahan atau pengurangan kas.

Adapun tujuan penerapan akuntansi akrual dalam akuntansi sektor publik menurut Mahmudi (2010:63), untuk menentukan *cost of service dan charging for service*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

2.1.3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP berbasis akrual

tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.

2.2. Konsep Implementasi

Menurut Usman (2002), Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Eliada (2017) menjawab dua pertanyaan penting dalam implementasi yaitu prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan dapat berhasil dan hambatan apa yang mengakibatkan gagalnya suatu implementasi kebijakan. Terkait dengan hal itu, terdapat empat aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau komitmen, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Berikut penjelasan dari keempat variabel tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan, dan apa yang menjadi sasaran dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga komunikasi yang baik sangat dibutuhkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan modal bagi setiap organisasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia (SDM) dan juga finansial. Apabila kompetensi SDM serta kemampuan finansial suatu organisasi memadai, maka hal tersebut akan menjadi kekuatan bagi suatu kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak dari karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Disposisi yang baik membuat implementasi kebijakan berjalan secara efektif, demikian juga sebaliknya, disposisi yang buruk akan menghambat proses implementasi dari kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Salah satu aspek yang penting dari struktur organisasi adalah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana, jelas, cepat, dan tepat. SOP ini merupakan pedoman bagi implementasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah kebijakan.

2.3. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Secara umum, laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode yang biasanya satu tahun. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan,

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut PSAK No. 01 paragraf ke 7, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan-catatan dan bagian integral dari laporan keuangan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berisi data-data keuangan. Data-data keuangan ini digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas organisasi tersebut.

Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu

periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3.1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi keuangan, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan.

Menurut PSAP No. 1 paragraf ke 3, laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan pemerintah bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas

dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.

Seperti yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 26 bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, keputusan sosial, maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Mardiasmo (2009:162) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan;
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah;
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya;
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang diisyaratkan;
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilihan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional; dan
- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.3.2. Komponen Laporan Keuangan

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Sesuai PSAP No. 1 Paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary repots*) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2.3.3. Struktur dan Isi

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/defisit-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a. Saldo anggaran lebih awal;
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih;
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo anggaran lebih akhir.

Disamping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional
- d. Pos luar biasa; dan
- e. Surplus/defisit-LO

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti :
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah :

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.3.4. Karakteristik Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan ;

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*oredictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi juga hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas kebijakan akuntansi yang saat ini

diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.4. Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Hisbullah, 2017	Implementasi dan Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Pemerintahan (Studi Kasus pada BAPPEDA Kabupaten Gowa)	1. Kualitas pelaporan di kantor BAPPEDA Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana pemerintah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Hal ini didukung dengan adanya bukti nyata bahwa BAPPEDA Kabupaten Gowa telah antusias mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan sebagaimana yang peneliti dapatkan di lapangan dan didukung rincian anggaran yang

		<p>telah dimanfaatkan untuk menggunakan sistem ini.</p> <p>2. Optimalisasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan di kantor BAPPEDA Kabupaten Gowa sudah berjalan secara efektif dan efisien dilihat dari program-program yang telah dijalankannya yang berkaitan dengan masalah kepegawaian sudah berjalan sebagaimana mestinya dari tahun 2015 sampai 2016.</p>
Yuni Lindri Astuti, 2017	Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar	<p>1. Laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Karanganyar telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi di Badan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menerapkan SAP Basis Akrual sejak tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam PP 71/2010.</p> <p>2. Perlakuan akuntansi pada LKPD Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2016 terkait penerapan PP 71/2010 basis akrual telah sesuai untuk pengakuan, pengukuran dan penyajian pos-pos dalam neraca. Hanya saja untuk pencatatan Persediaan tidak menggunakan metode Perpetual melainkan menggunakan metode Fisik. Pencatatan tersebut tidak menyalahi aturan dalam PSAP, hanya saja mengurangi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.</p>

2.5. Kerangka Pemikiran

Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan pusat maupun daerah di Indonesia adalah hal yang baru. Akuntansi berbasis akrual ini baru saja dikeluarkan peraturannya melalui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual yang dulunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tetapi tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah sehingga dikaji ulang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. SAP Berbasis Akrual ini dibuat dengan tujuan agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan bisa lebih akurat, relevan dan dapat lebih transparan, sehingga lebih dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi 4 (empat) kriteria kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

